BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TANGGUNG JAWAB BPOM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

Menurut E. Utrecht:

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”¹⁸

Menurut Immanuel Kant:

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”¹⁹

Menurut Thomas Hobbes:

“Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”²⁰

¹⁸ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

¹⁹ Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

²⁰ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10

Menurut Jhon Austin :

“Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.”²¹

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-niali tersebut diwujudkan dalm realitas nyata.²² Sebagai bagian dari legal system, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke daiam variabel independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Aspek-aspek kehidupan sosial ini yang menjadi dependent variable. Dalam kedudukan hukum sebagai independent variable maka dapat dikaji secara law in action serta legal impact. Mengkaji hukum sebagai independent variable termasuk kajian hukum dan masyarakat (law and society). Sebaliknya, jika hukum dijadikan dependentvariable, maka termasuk kajian sosiologi hukum (sociology of law). Perbedaan keduanya ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya ialah di antara keduanya tidak lagi memandang

²¹ H. Salim,HS,SH,MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

²² Sajipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.vii.

hukum sebagai suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif-dogmatif hukum.²³

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makinmapan atau merupakan istilah yang dijadikan (coined). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeapassing.rechtshandhaving* (Belanda); *law enfocement, application* (Amerika).²⁴

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untu mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.²⁵

²³ Siswanto Sunarsono, *Op.cit*, hlm.110.

²⁴ Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 11

²⁵ *Ibid*

Sedangkan menurut Jimly Aashiddiqie penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁶

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

²⁶ Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 12

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁷

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

Terwujudnya penegakan hukum secara proposional wadah yang namanya lembaga peradilan dan di dalamnya terdapat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menjadi komponen penting dalam

²⁷ *Ibid*, hlm 13

²⁸ Laurensius Arilman, *Op.cit*, hlm. 14

²⁹ *Ibid*.

pencapaian tujuan hukum.³⁰ Oleh karena itu hukum baru akan berjalan dengan efektif apabila di dalam menerapkannya yang menjadi tujuan pelaksanaannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, dan bukan menjadikannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa.³¹

Para penegak hukum harus mawas diri karena selain harus menjaga agar hukum dapat berjalan dengan lurus dan benar akan tetapi juga mampu mengikat mereka supaya mau menghormati dan mematuhi hukum.³²

Karenanya penegak hukum tidak hanya harus mampu mengatur hukum melainkan dituntut pula untuk mendisiplinkan diri supaya mematuhi hukum, menegakkan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Apabila penegak hukum itu sendiri baik dalam tindakannya maupun tingkah lakunya sehari-hari selalu mengabaikan hukum.

B. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Hanya saja definisi tentang Kepolisian

³⁰ Sabian Utsman, *“Menuju Penegakan Hukum Responsif”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.30

³¹ Wahyu Afandi, *“Hakim dan Penegakan Hukum”*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm.7.

³² *Ibid*

tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (Pegawai Negara yang bertugas menjaga kemanan dan ketertiban).³⁴

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politea”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“politei”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executivebestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain

³³ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

³⁴ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

menjaga ketertiban dan ketentraman (*ordre en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.³⁵

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjjono, menurut Sadjjono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁶

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah

³⁵ Sadjjono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 39

Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Pengendalian Masa Demonstrasi Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa secara umum adalah:

1. Melakukan negosiasi dengan korlap tentang pelaksanaan unjuk rasa agar dapat berjalan tenang dan tanpa aksi anarkis.
2. Jika dengan proses negosiasi tidak efektif, maka pimpinan anggota kepolisian di lapangan memerintahkan pembubaran terhadap aksi unjuk rasa tersebut.

3. Terhadap pelaku tindakan anarkis yang melawan hukum akan ditindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengamanan unjuk rasa sejak tahap persiapan hingga pengaman di TKP yaitu :

1. Membuat Rencana Pengamanan,
2. Persiapan anggota, yang juga meliputi pemberian arahan serta pembagian tugas oleh pimpinan,
3. Melakukan pengamanan di TKP. Proses pengaman di TKP dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengaman yang didasarkan pada tindakan massa pengunjuk rasa, yaitu :

- a. Zona Hijau

Pasal 1 Ayat 25, Zona hijau merupakan kondisi di mana massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur.³⁷

- b. Zona Kuning

Pasal 1 Ayat 26, Situasi kuning adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.³⁸

- c. Zona Merah

³⁷ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang “Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara”

³⁸ *Ibid*

Pasal 1 Ayat 27, Situasi merah adalah kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya.³⁹

Dalam melaksanakan tugasnya mengamankan aksi unjuk rasa, pihak kepolisian senantiasa berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengendalian Massa Tahun 2012. Berdasarkan SOP tersebut, prosedur dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa terbagi dalam 3 tahap yaitu:

Tahap Persiapan⁴⁰

- a. Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka lakukan kegiatan persiapan, yaitu :
 - 1) Siapkan surat perintah;
 - 2) Siapkan kekuatan Dalmas yang memadai dengan jumlah dan karakteristik massa;
 - 3) Lakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi dan kesehatan.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Standar Operasional Prosedur tentang “Pengendalian Massa”, Makassar, 2012

- 4) Siapkan rute pasukan Dalmas menuju obyek dan rute penyelamatan (escape) menentukan route berangkat dan route kembali;
 - 5) Siapkan sistem komunikasi seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan;
 - 6) Berikan APP yang jelas kepada anggota khususnya tentang karakteristik massa, jumlah massa, tuntutan massa, situasi obyek tempat unjuk rasa serta rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan Satuan Dalmas dalam menghadapi para demonstran.
- b. Mengingatkan kembali kepada personel dalmas tentang larangan dan kewajiban yang harus dilakukan selama menghadapi unjuk rasa. Adapun larangan dan kewajiban yang dimaksud, adalah:
- 1) Larangan
 - a) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - b) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
 - c) Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas;
 - d) Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
 - e) Keluar dari ikatan/Formasi dan lakukan pengejarn massa secara perorangan;
 - f) Mundur membelakangi massa pengunjung rasa;

- g) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual dan memaki pengunjung rasa;
- h) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban

- a) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b) Melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan.
- c) Setiap pergerakan Pasukan Dalmas selalu dalam ikatan kesatuan
- d) Melindungi jiwa dan harta benda.
- e) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
- f) Patuh dan taat kepada perintah kepala kesatuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Tahap Pelaksanaan

- a. Cara Bertindak Dalmas pada Situasi Tertib/Hijau adalah
 - 1) Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Lantas;
 - 2) Satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian;

- 3) Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas.
- 4) Petugas yang telah ditunjuk merekam jalannya unjuk rasa dari situasi umum sampai khusus selama unjuk rasa berlangsung;
- 5) Negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- 6) Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- 7) Negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- 8) Apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsek Urban, Kapolres/Kapolreta/Kapolrestabes, dan Kapolda

meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;

- 9) Mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsek Urban selaku pengendali taktis;
- 10) Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta Urban, Kapolres/Kapolrestabes, dan Kapolda;
- 11) Apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.

b. Cara Bertindak pada Dalmas untuk Situasi Tidak Tertib/Kuning adalah:

- 1) Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
- 2) Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
- 3) Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;

- 4) Atas perintah Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
- 5) Setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
- 6) Apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memberikan himbauan kepolisian.
- 7) Apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
 - a) Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;

- b) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya) dan;
 - c) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
- 8) Evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
- 9) Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes; dan
- c. Cara Bertindak Pada PHH dalam Situasi melanggar hukum/merah adalah:
- 1) Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
 - 2) Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
 - 3) Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;

4) Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Sabhara untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta/Polrestabes terdekat.

1. Tahap Pengakhiran

Konsolidasi:

- a. Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan serta melakukan analisa evaluasi pelaksanaan tugas;
- b. Dalam rangka konsolidasi pelaksanaan apel dilakukan oleh:
 - 1) Kapolsek/Kapolsek Urban dalam situasi hijau;
 - 2) Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes dalam situasi kuning dan;
 - 3) Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- c. Setelah selesai pelaksanaan tugas, satuan Dalmas kembali ke kesatuan masing-masing dengan tertib.

C. Demonstrasi

3. Pengertian Demonstrasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.”⁴¹

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.⁴²

Sesuai dengan pengertian dari demonstrasi seperti terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

⁴¹ Pasal 1 ayat (3) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)

⁴² http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa d akses 21 April 2021 pukul 10.00 WIB

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa demonstrasi juga merupakan unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara. Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki dan tindakan kekerasan sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek.

Unjuk rasa bisa dikatakan atau Demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Ini artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Demokrasi adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, demonstrasi harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan.

Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

4. Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Dalam negara hukum diakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana merupakan hak - hak dasar yang harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Salahsatu hak yang merupakan hak dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Berdasarkan penetapan undang - undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Negara menjamin hak dan kewenangan setiap warga Negara dalam hal menyampaikan pendapatnya. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu:

- a. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka hukum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

- c. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (unjuk rasa). “Mendemostrasi”, berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.⁴³

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 250

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemostrasi merupakan salahsatu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan tersebut tidak didengar ataupun mendapat tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya persaan frustasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.

Pada Pasal 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikemukakan bahwa penyampaikan pendapat di muka umum harus dilakukan dengan berlandaskan pada :

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas proporsionalitas; dan
- e. Asas manfaat

5. Kekerasan

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.²³ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia

umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (torture) dan peneanan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (severe pain or suffering).⁴⁴

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini, melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui yang terjadi atas dirinya.

Menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat

⁴⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme#Anarkisme_dan_kekerasan

intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan idapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan, juga diperhatikan pula bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu.⁴⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya.⁴⁶

D. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit hal. 45

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 20

sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaan terhadap aturan menjadi penting.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki,

⁴⁷ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 April 2021 pukul 21.00 WIB

disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.

2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan

negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.⁴⁸

Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komnas HAM
- d. Pengadilan HAM di Indonesia
- e. Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI)
- f. Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
- g. Komnas Anak.

UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No.39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung

⁴⁸ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hal.8.

jawab pemerintah dalam penghormatan , perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Nilai-nilai HAM selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (to respect) berarti bahwa negara harus menahan diri (refrain) dari intervensi terhadap hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.

Kewajiban untuk menjamin (to ensure) adalah kewajiban yang bersifat positif (positive duty) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (to protect) dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfill). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban

negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (private interference). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggaran. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (commission), atau melakukan pembiaran (ommission).

4. Prinsip Equality Before The Law

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstaat) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴⁹ Ini merupakan

⁴⁹ Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Perss. Hlm. 26

pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep Equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Equality before the law dalam arti sebenarnya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang didepan hukum.⁵⁰ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdara) dan (KUHDagang). Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm.20

memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan di hadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok merjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi kekuasaannya.

Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa sehingga pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf (a).